

ABSTRACT

The problem in this study in the study was the lack of regulation of road facilities, the amount of waste scattered, the lack of orderly settlement facilities, and the increasing needs of the community. Such conditions affect the quantity and quality of housing, often growing slums. The researcher analyzed the problems in government coordination. based on these problems, the formulation of the problem posed is How is the Coordination conducted by the Camat in the arrangement of slums in Kiara Subdistrict inclined, What factors hinder the coordination of the sub-district head in structuring slums in kiara Subdistrict are inclined and. Any efforts in effective coordination in improving the arrangement of slums in the city of Bandung.

Analysis of the problem in this study was carried out by the method of coordination theory approach from George Thery in his book Terry, George and Leslie W. Rue 2010. Fundamentals of Management. The eleventh print of Jakarta: PT Bumi Aksara. Based on crucial factors in government coordination through: Regular synchronization, time management that is guided, harmonized, set goals. based on the theoretical approach the researchers formulated propositions as follows: Government Coordination in Kiarcondong Subdistrict in structuring slum settlements is not optimal, then the Coordination carried out by the Sub-District Head must be in accordance with the dimensions of synchronization, guided timing, harmonization and set objectives.

This study uses qualitative methods with primary and secondary data sources, more data collection techniques to interview. Factors that become supporters include: coordination relations with other institutions / agencies, equipment that is sufficiently supportive. While the inhibiting factors include: miscommunication or misunderstanding when coordination, community apathy, priority scale, synchronization of people who need a decent house is inappropriate.

The results of the study found another factor, namely the ineffectiveness of the organizational structure, between the subdistrict and the related agencies, which caused the slum settlement structuring program system to not run normally, which led to the ineffectiveness of monitoring and evaluation.

Keywords: coordination of structuring slum settlements

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini dalam penelitian adalah kurang tertatanya sarana jalan, banyaknya sampah yang berserakan, kurang tertatanya sarana permukiman, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali menumbuhkan permukiman kumuh. Peneliti menganalisis permasalahan pada koordinasi pemerintahan. berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimanakah Koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam penataan permukiman kumuh di Kecamatan Kiara Condong, Faktor apakah yang menghambat koordinasi Camat dalam penataan permukiman kumuh di Kecamatan Kiara Condong dan. Upaya-upaya apa saja dalam Koordinasi yg efektif dalam peningkatan penataan permukiman kumuh di kota Bandung.

Analisis masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan teori koordinasi dari George Thery dalam bukunya Terry, George dan Leslie W. Rue 2010. Dasar-dasar Manajemen. Cetakan kesebelas Jakarta: PT Bumi Aksara. Berdasarkan faktor-faktor krusial dalam koordinasi pemerintahan melalui : Sinkronisasi yang teratur, pengaturan waktu yang terpimpin, harmonis, tujuan yang ditetapkan. berdasarkan pada pendekatan teori tersebut peneliti merumuskan proporsisi sebagai berikut Koordinasi Pemerintah Di Kecamatan Kiaracondong dalam penataan permukiman kumuh belum optimal, maka Koordinasi yang dilakukan oleh Camat harus sesuai dengan dimensi-dimensi sinkronisasi, pengaturan waktu terpimpin, harmonisasi dan tujuan yang ditetapkan.

.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data lebih ke wawancara. Faktor yang menjadi pendukung antara lain : hubungan koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya baik, perlengkapan sarana yang cukup mendukung. Sedangkan faktor penghambat antara lain : miskomunikasi atau kesalahpahaman saat koordinasi, apatisme masyarakat, skala prioritas, sinkronisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni tidak sesuai.

hasil penelitian menemukan faktor lain yakni belum efektifnya struktur organisasi, antara pihak kecamatan dengan dinas terkait yang menyebabkan sistem program penataan permukiman kumuh tidak berjalan normal sehingga menimbulkan ketidak efektifan adanya monitoring dan evaluasi.

Kata kunci : koordinasi penataan permukiman kumuh